

LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN PRODI



JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2008 -2014
(STUDI KASUS KAB/KOTA D I YOGYAKARTA)**

TIM PENELITI :

**AGUS TRI BASUKI, SE., MSi.
DR. ENDAH SAPTUTYNINGSIH, SE., MSi.**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
2016**

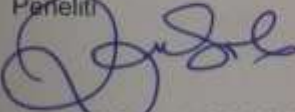
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN UNGGULAN PRODI

1. Judul Usulan :
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2008-2014 (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI YOGYAKARTA)
2. Ketua Peneliti
a) Nama lengkap : Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
b) Bidang keahlian : Ekonomi Regional
c) Jabatan Struktural : Sekprodi Ilmu Ekonomi FE UMY
d) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e) Unit kerja : Fakultas Ekonomi UMY
f) Alamat surat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Bantul 55183 Yogyakarta
g) Telpon/Faks. : 0274-387656/ fax 0274 387646
h) E-mail : agustribasuki@yahoo.com
3. Anggota Peneliti
- | No. | Nama dan Gelar Akademik | Bidang Keahlian | Instansi | Alokasi Waktu (jam/minggu) |
|-----|----------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| 1. | DR. Endah Saptutyingsih SE.,MSi. | Ekonomi Lingkungan | UMY | 15 |
4. Obyek Penelitian
5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Anggaran Yang Diajukan : **Rp 19.872.500,-**
6. Lokasi Penelitian : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Hasil yang ditargetkan :
1. Laporan Akhir
2. Jurnal
3. Buku

Yogyakarta, September 2016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi UMY

Dr. Nano Frawoto, M.Si.
NIK. 143 046/0504060501

Peneliti

Agus Tri Basuki, SE., M.Si.
NIK. 143 043/0514106801

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penelitian ilmiah berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2008-2014 (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA D I YOGYAKARTA) ini dapat terselesaikan. Penulis sangat tertarik untuk ikut serta memikirkan masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan di Indonesia, tidak terasa muncul masalah-masalah dampak pembangunan, hal ini tentunya tidak bias dibiarkan demikian saja karena di lain pihak akan menimbulkan dampak yang merugikan. Usaha peningkatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas pemerintah daerah, apalagi tahun ini sudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean, sehingga etos kerja kita sebagai bangsa perlu ditingkatkan lagi, khususnya pada penekanan peningkatan Sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini merupakan langkah awal penulis untuk senantiasa peduli dan prihatin dengan permasalahan Sumber Daya Manusia terutama rangking daya saing bangsa kita yang masih rendah dibanding negara-negara tetangga kita di ASEAN. Dan besar harapan penulis, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan mendapat tindak lanjut untuk evaluasi pada penelitian selanjutnya kedepan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Kepala LP3M UMY yang telah memberikan kesempatan dan dorongan, serta fasilitas kepada penulis untuk melakukan kajian ini. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstrak

| | | |
|---------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang masalah | 5 |
| | 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| | 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| | 1.4. Urgensi Penelitian | |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS | 9 |
| | 2.1. Pembangunan Manusia | 9 |
| | 2.2. Indeks Pembangunan Manusia | 9 |
| | 2.3. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 10 |
| | 2.4. Komponen dan Indikator IPM | 11 |
| | 2.5. Tinjauan Tentang Belanja Daerah | 11 |
| | 2.6. Tinjauan Tentang Gini Ratio | 13 |
| | 2.7. Tinjauan Tentang Kemiskinan | 14 |
| | 2.8. Penelitian Terdahulu | 15 |
| | 2.9. Kerangka Konseptual | 17 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 20 |
| | 1.1. Definisi Operasional dan Prosedur Pengukuran | 20 |
| | 1.2. Teknis Analisis Data | 22 |
| | 1.3. Model Regresi Data Panel | 23 |
| | 1.4. Metode Estimasi Model Regresi Panel | 23 |

| | | |
|--------|--|----|
| | 1.5. Pemilihan Model | 24 |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | 30 |
| | 4.1. Kondisi Geografis Daerah | 30 |
| | 4.2. Jumlah Penduduk | 34 |
| | 4.3. Indeks Pembangunan Manusia | 36 |
| | 4.4. Pendapatan Perkapita | 37 |
| | 4.5. Pengeluaran Pemerintah daerah Bidang Kesehatan | 38 |
| | 4.6. Pengeluaran Pemerintah Bidang Fasilitas Umum | 39 |
| | 4.7. Rasio Gini | 40 |
| | 4.8. Jumlah Penduduk Miskin | 41 |
| BAB V | HASIL PEMBAHASAN | 44 |
| | 5.1. Uji Kualitas Data | 44 |
| | 5.2. Analisis Model Terbaik | 45 |
| | 5.3. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel | 47 |
| | 5.4. Hasil Estimasi Model Data Panel Random Effect Model | 49 |
| | 5.5. Pembahasan | 53 |
| BAB VI | KESIMPULAN DAN SARAN | 57 |
| | 6.1. Kesimpulan | 57 |
| | 6.2. Saran | 58 |

Daftar Pustaka

Lampiran

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2008 -2014
(STUDI KASUS KAB/KOTA D I YOGYAKARTA)**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah ingin melihat pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum, Rasio Gini, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 kabupaten/kota di Daerah istimewa Yogya.

Penelitian ini merupakan studi kasus observasional dengan 5 kabupaten/kota di DI Yogyakarta, dengan jangka waktu 7 tahun (2008-2014). Obyek penelitian terdiri dari lima variabel bebas, yaitu: Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum, Rasio Gini, dan Jumlah Penduduk Miskin. Dengan menggunakan data panel maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagian besar variabel bebas mempengaruhi indeks pembangunan manusia kecuali pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan indeks Pembangunan Manusia, hal ini karena kenaikan rata-rata pendapatan perkapita belum bisa mendorong kenaikan perkapita, dengan kata lain kenaikan pendapatan perkapita belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kata kunci: *HDI, data panel, Random Effect*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity* (PPP) Index.

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara.

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Alat ukur ini diluncurkan oleh Mahbub ul Haq dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programme* (UNDP). Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap naik turunnya IPM.

Tabel 1.1

Perkembangan IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2006-2013

| Kabupaten/Kota | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kulonprogo | 72,01 | 72,76 | 73,26 | 73,77 | 74,49 | 75,04 | 75,33 | 75,95 |
| Bantul | 71,96 | 72,78 | 73,38 | 73,75 | 74,53 | 75,05 | 75,51 | 76,01 |
| Gunung Kidul | 69,44 | 69,68 | 70,00 | 70,17 | 70,45 | 70,84 | 71,11 | 71,64 |
| Sleman | 76,22 | 76,70 | 77,24 | 77,70 | 78,20 | 78,79 | 79,39 | 79,97 |
| Yogyakarta | 77,81 | 78,14 | 78,95 | 79,28 | 79,52 | 79,89 | 80,24 | 80,51 |
| DIY | 73,70 | 74,15 | 74,88 | 75,23 | 75,77 | 76,31 | 76,75 | 77,37 |

Sumber : Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014

Secara umum, perkembangan IPM DIY selama tahun 2006-2013 memiliki pola yang sama dengan dengan angka IPM nasional. Namun demikian, level IPMDIY masih jauh di atas level IPM nasional. Hal ini mengisyaratkan level pencapaian pembangunan manusia di DIY yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Berdasarkan levelnya, angka IPM DIY pada tahun 2013 berada di peringkat 33 kedua tertinggi secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Peringkat ini membaik setelah sebelumnya selalu berada di peringkat keempat tertinggi sesudah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara serta Riau sejak tahun 2008. Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur menggunakan rata-rata reduksi shortfall per tahun. Nilai shortfall mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Nilai reduksi shortfall IPMDIY selama periode 2012-2013 tercatat sebesar 2,67.

Pencapaian pembangunan manusia di semua kabupaten/kota DIY pasca krisis ekonomi 1997/1998 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari nilai IPM selama periode 1999-2012 di semua kabupaten/kota yang cenderung meningkat secara bertahap. Secara umum, kualitas pembangunan

manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul selama satu dekade terakhir selalu berada di peringkat terakhir. Pencapaian IPM di seluruh kabupaten di DIY sampai dengan tahun 2013 termasuk dalam kategori “menengah sedang” atau memiliki nilai IPM antara 66-80, bahkan khusus untuk Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori “tinggi” karena memiliki nilai IPM di atas 80.

IPM tertinggi tahun 2013 masih disandang oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 80,51. Posisi selanjutnya adalah Kabupaten Sleman (IPM sebesar 79,97) dan Bantul (IPM sebesar 76,01). Sebaliknya, IPM terendah terjadi di Gunungkidul dengan nilai 71,64. Gambaran perbandingan pencapaian IPM Kabupaten Gunungkidul dengan Kota Yogyakarta menjadi sebuah perbandingan yang kontras. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial antar wilayah di DIY. Ke depan, perlu dipikirkan upaya-upaya yang lebih intensif untuk mengurangi kesenjangan ini. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui pengembangan infrastruktur dan ekonomi yang berbasis lokal. Gunungkidul dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, sehingga jalinan kerja sama antara pemerintah selaku fasilitator dengan pihak swasta maupun masyarakat untuk pengembangan potensi ini menjadi penting untuk dilakukan. Kegiatan investasi yang masih terpusat di Kota Yogyakarta dan sekitarnya harus diperluas cakupannya dan diarahkan untuk pengembangan wilayah-wilayah yang memiliki potensi tetapi infrastrukturnya masih tertinggal.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan

tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikannya, beberapa negara maju menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas aset.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional secara simultan berdampak terhadap jumlah alokasi belanja modal. Indeks pembangunan manusia dicerminkan oleh pembangunan berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur guna meningkatkan taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak. Untuk ini maka pemerintah D I Yogyakarta memerlukan alokasi belanja modal untuk mewujudkan pencapaian indeks pembangunan manusia yang baik.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat kita rumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Seberapa besar pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Seberapa besar pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Seberapa besar pengaruh Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah :

1. Ingin mengetahui pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila pendapatan perkapita meningkat akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.
2. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan meningkat akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.
3. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum meningkat akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.
4. Ingin mengetahui pengaruh Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila Gini Rasio menurun akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat.
5. Ingin mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila jumlah penduduk miskin menurun akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat.

1.4. Urgensi Penelitian

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Beberapa manfaat melaksanakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah lokal, meningkatkan ketertanggapan pemerintah terhadap kebutuhan–

kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan Human Development Index (HDI) adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk.

IPM merupakan gabungan dari tiga unsur utama pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) yang diukur oleh tingkat melek orang dewasa (dengan timbangan dua pertiga) serta rata-rata tahun bersekolah (timbangan : satu pertiga), standar hidup layak (standard of living) yang diukur oleh PDB per kapita setelah disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity /PPP).

Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor

produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang berorientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan manusia (Gevisioner, 2004).

Salah satu ukuran IPM adalah besarnya pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pendidikan (Kuncoro, 2004). Konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting. Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia(Suyanto,2009). Secara umum kapasitas fiskal (fiscal capacity) adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.

Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. $IPM < 50$ (rendah)
2. $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah)
3. $IPM \geq 80$ (tinggi)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam

memperluas pilihan-pilihan. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut (UNDP,2004)

$$IPM = \frac{1}{3}(Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

Dengan penjelasan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Y1 = Indeks Harapan Hidup

Y2 = Indeks Pendidikan

Y3 = Indeks Standard Hidup Layak

Teori pembentukan IPM diukur dengan 3 dimensi, yaitu (UNDP-2004) : Berumur panjang dan sehat di tunjukan oleh harapan hidup ketika lahir, yang dirumuskan menjadi Angka harapan hidup. Berdimensi ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah, kedua komponen tersebut membentuk Indeks Pendidikan. Dimensi standar hidup layak ditunjukan oleh pengeluaran riil perkapita, yang di bakukan dalam Indeks Pendapatan.

2.3. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

2.4. Komponen dan Indikator IPM

Komponen IPM adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e_0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas Kor. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

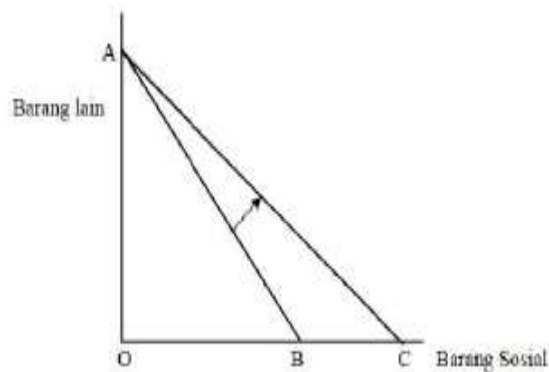
Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

2.5. Tinjauan Tentang Belanja Daerah

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi,

Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno,2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan dengan konsep budget line dapat dijelaskan sebagai berikut :



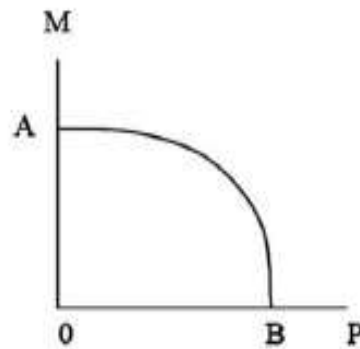
Gambar 1. Perubahan Budget Line Karena Adanya Pengeluaran Pemerintah
 Sumber: Sukirno (2000)

Semula dengan anggaran tertentu area konsumsi berada pada pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah untuk barang sosial, misalnya : subsidi untuk meringankan sekolah membuat garis anggaran bergeser ke kanan yakni garis AC. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia. Dalam konteks ini semakin besar Belanja Daerah akan memberi peluang yang lebih luas untuk meningkatkan IPM.

2.6. Tinjauan Tentang Gini Ratio

Menurut Todaro (2006), pendekatan yang sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi. Untuk melukiskan permasalahannya, produksi dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang, yaitu barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, pakaian dan perumahan) serta yang kedua barang mewah. Dengan asumsi semua faktor produksi telah dimanfaatkan secara penuh, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan kombinasi

barang yang akan diproduksi dan bagaimana masyarakat menurut pilihannya. Gambar 2.4 berikut ini memberikan gambaran mengenai masalah ini.



Gambar 2. Kurva Kemungkinan Produksi

Sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi barang mewah, sementara sumbu horizontal menunjukkan jumlah produksi barang kebutuhan pokok. Kurva kemungkinan produksi merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi kedua barang yang diproduksi secara maksimum. Titik A dan B memberikan gambaran tentang kombinasi produksi antara barang mewah dengan barang kebutuhan pokok dalam tingkat pendapatan yang sama besar. Pada titik A lebih banyak barang mewah yang diproduksi bila dibandingkan dengan kebutuhan pokok. Sebaliknya pada titik B lebih sedikit barang mewah dihasilkan untuk masyarakat dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok.

2.7. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.

Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma Kuriata Ginting, 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

2.8. Penelitian Terdahulu

Lanjouw, dkk (dalam Whisnu Adhi Saputra 2011) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan

penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham Irawan yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia menemukan adanya hubungan positif antara PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal asing terhadap IPM sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan – akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk – mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

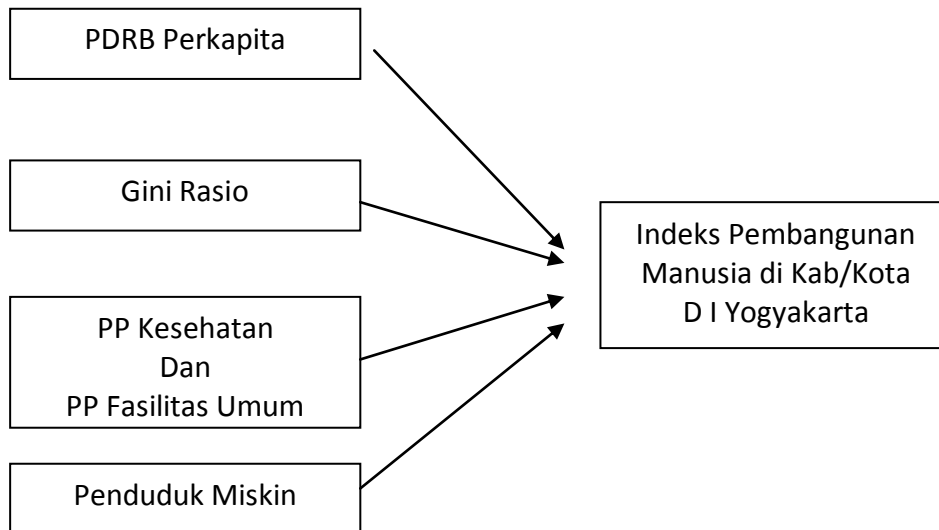
penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin. Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya menguntungkan pemilik tanah dan bukan tenaga kerja. Akan tetapi, kondisinya bisa berubah. Masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan IPM jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Selain itu, struktur dan proses yang ada di masyarakat sudah tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi juga dinikmati kaum miskin. Menurut World Development Report, kemajuan pada kedua bidang saling memperkuat satu sama lain dan yang satu tanpa yang lain tidak cukup (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

2.9. Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah pustaka, dalam upaya peningkatan IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka akan diteliti variabel-variabel yang berhubungan dengan perkembangan IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Belanja Daerah, Gini rasio (ukuran ketimpangan distribusi pendapatan), proporsi pengeluaran konsumsi

non makanan (ukuran besarnya pendapatan masyarakat), dan rasio ketergantungan dengan kerangka pemikiran seperti pada gambar 4.



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Pada kerangka pemikiran dijelaskan bahwa secara bersama-sama dan simultan, besaran variabel pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, gini rasio dan jumlah penduduk miskin akan berpengaruh terhadap pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia pada setiap Kabupaten/Kota di Daerah istimewa Yogyakarta. Setelah melalui telaah pustaka, dan dengan mengacu pada teori-teori yang dikemukakan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menganalisis data sekunder mengenai Variabel Belanja Daerah, Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan, dan Rasio Ketergantungan, yang di duga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Cakupan spasial studi adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta yaitu 5 kabupaten/kota, dengan series data 8 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan 40 data panel yang merupakan penggabungan data *spasial* dan *time series*.

3.1. Definisi Operasional dan Prosedur Pengukuran

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel Penelitian

| Notasi | Arti | Uraian | Cara Mengukur |
|----------|--|---|--|
| IPM | Indeks Pembangunan Manusia | Kuantifikasi dari ukuran agregat kualitas manusia dalam pembangunan manusia dari UNDP (bernilai antara 0 sampai dengan 100) | Merupakan Indeks Komposit : IPM = Indeks Pembangunan Manusia Y1= Indeks Harapan Hidup Y2= Indeks Pendidikan Y3= Indeks Standard Hidup Layak Perubahan nilai IPM berbanding lurus dengan besarnya nilai Indeks Y1, Y2, dan Y3 di kalikan satu pertiga. |
| PDRBPerc | Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita | Total Pendapatan Domestik Regional Bruto dibagi dengan | PDRB Perc = Total PDRB/∑Pendd dan dinyatakan dalam rupiah |

| Notasi | Arti | Uraian | Cara Mengukur |
|---------|-------------------------------------|--|--|
| | | jumlah penduduk | |
| PPKES | Belanja Daerah untuk kesehatan | Pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya | Dihitung dari bagian APBD daerah yang digunakan untuk bidang kesehatan. (juta rupiah) |
| PPFASUM | Belanja daerah untuk Fasilitas umum | Pengeluaran pemerintah daerah yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum (jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit dll) | Dihitung dari bagian APBD daerah yang digunakan untuk bidang Fasilitas Umum. (juta rupiah) |
| GR | Gini Rasio | Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan (bernilai antara 0 sampai dengan 1) | <p>Rumus untuk menghitung gini ratio:</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$ <p>dengan: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-I, dan Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i. Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 → ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 → ketimpangan sedang G > 0,5 → ketimpangan tinggi</p> |
| JPMIS | Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. | Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). |

3.2. Teknis Analisis Data

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. **Pertama**, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. **Kedua**, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series*. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja. Dan Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Menurut Wibisono (2005) keunggulan regresi data panel antara lain : **Pertama**. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. **Kedua**. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks. **Ketiga**, data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.

Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. **Kelima**, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan **Keenam**, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

3.3. Model Regresi Data Panel

Model Regresi Panel dari judul diatas sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

Keterangan:

| | |
|---------------|---|
| Y | = Variabel dependen (LDR) |
| α | = Konstanta |
| X1 | = Variabel independen 1 |
| X2 | = Variabel independen 2 |
| $b_{(1...2)}$ | = Koefisien regresi masing-masing variabel independen |
| e | = <i>Error term</i> |
| t | = Waktu |
| i | = Perusahaan |

3.4. Metode Estimasi Model Regresi Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa

menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

3.5. Pemilihan Model

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

1. Uji Chow

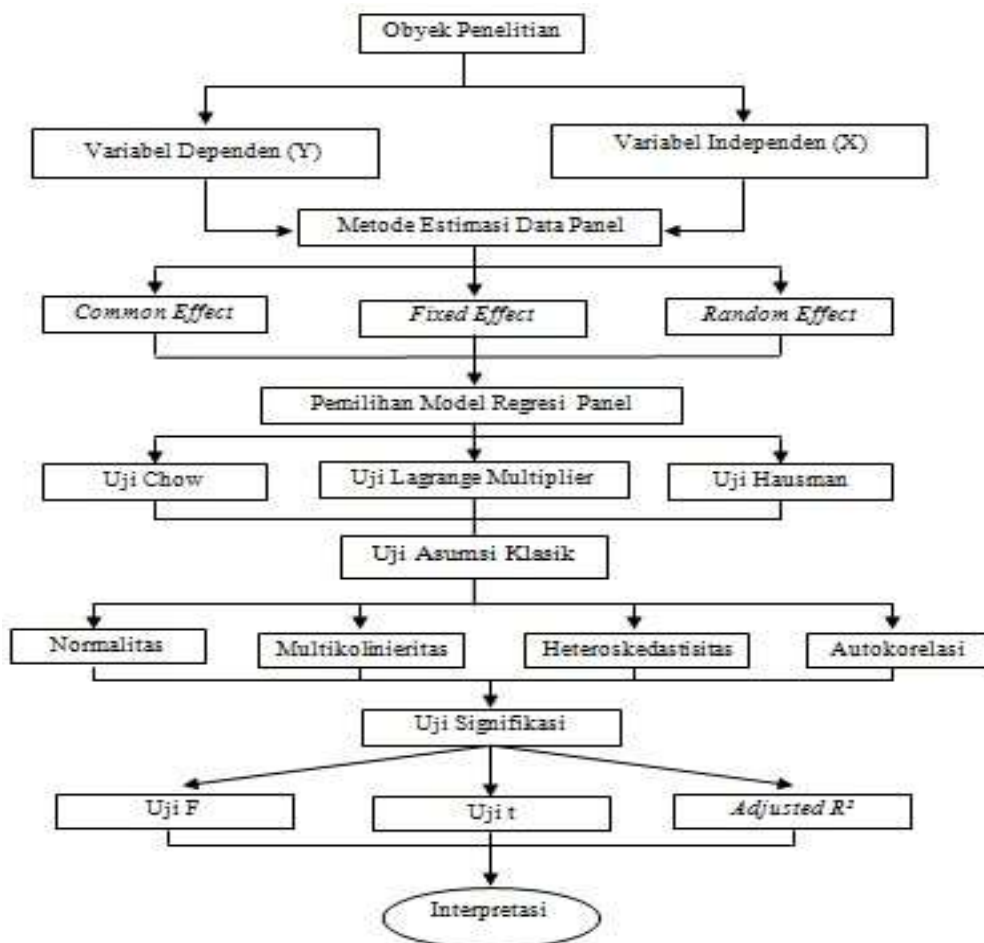
Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan.

3. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM).



A. Common Effects Model

Model *common effects* merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross*

section dalam bentuk *pool*, mengestimasiya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square*.

Adapun persamaan regresi dalam model *common effects* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

i = Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Yogyakarta

t = 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

dimana i menunjukkan *cross section* (individu) dan t menunjukkan periode waktunya. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section* dapat dilakukan.

B. Fixed Effects Model

Model *Fixed effects* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepnya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects*, setiap merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + i\alpha_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_1 \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & x_{p1} \\ x_{12} & x_{22} & x_{p2} \\ x_{1n} & x_{2n} & x_{pn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Teknik seperti diatas dinamakan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model.

C. Random Effects Model

Berbeda dengan *fixed effects model*, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan *random effects model* (REM). Model ini sering disebut juga dengan *error component model* (ECM). Dengan demikian, persamaan model *random effects* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + w_{it}$$

i = Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Yogyakarta

t = 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Dimana :

$$w_{it} = \varepsilon_{it} + u_i ; E(w_{it}) = 0; E(w_{it}^2) = \alpha^2 + \alpha_u^2;$$

$$E(w_{it}, w_{jt-1}) = 0; i \neq j; E(u_i, \varepsilon_{it}) = 0;$$

$$E(\varepsilon_i, \varepsilon_{is}) = E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) = E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{js}) = 0$$

Meskipun komponen error w_t bersifat homoskedastik, nyatanya terdapat korelasi antara w_t dan w_{t-1} -s (equicorrelation), yakni :

$$\text{Corr}(w_{it}, w_{i(t-1)}) = \alpha_u^2 / (\alpha^2 + \alpha_u^2)$$

Karena itu, metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effects*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *Generalized Least Squares (GLS)* dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *cross-sectional correlation*.

Judge (1980) dalam Fadly (2011), menyatakan ada perbedaan mendasar untuk menentukan pilihan antara FEM (*Fixed Effects Model*) dan ECM (*Error Component Model*) antara lain sebagai berikut (Gujarati, 2004):

1. Jika T (jumlah data *time series*) besar dan N (jumlah unit *cross-section*) kecil, perbedaan antara FEM dan ECM adalah sangat tipis. Oleh karena itu, dapat dilakukan penghitungan secara konvensional. Pada keadaan ini, FEM mungkin lebih disukai.
2. Ketika N besar dan T kecil, estimasi diperoleh dengan dua metode dapat berbeda secara signifikan. Pada ECM, dimana adalah komponen random *cross-section* dan pada FEM, ditetapkan dan tidak acak. Jika sangat yakin dan percaya bahwa individu, ataupun unit *cross-section* sampel adalah tidak acak, maka FEM lebih cocok digunakan. Jika unit *cross-section* sampel adalah random/acak, maka ECM lebih cocok digunakan.
3. Komponen *error* individu dan satu atau lebih regresor berkorelasi, estimator yang berasal dari ECM adalah bias, sedangkan yang berasal dari FEM adalah *unbiased*.
4. Jika N besar dan T kecil, serta jika asumsi untuk ECM terpenuhi, maka estimator ECM lebih efisien dibanding estimator FEM.

Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) antara lain :

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu;
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Secara formal, ada tiga prosedur pengujian yang akan digunakan, yaitu uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara :

1. Model common effects atau *fixed effects*;
2. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* atau model *random effects*;
3. Uji *Hausman* yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effects* atau model *random effects*.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis Daerah

4.1.1 Batas Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- ✓ Utara : Magelang, Boyolali, Klaten
- ✓ Timur : Wonogiri, Sukoharjo,
- ✓ Barat : Purworejo



Sumber : Bappeda DIY, 2013

Gambar 4. 1 Peta Administrasi

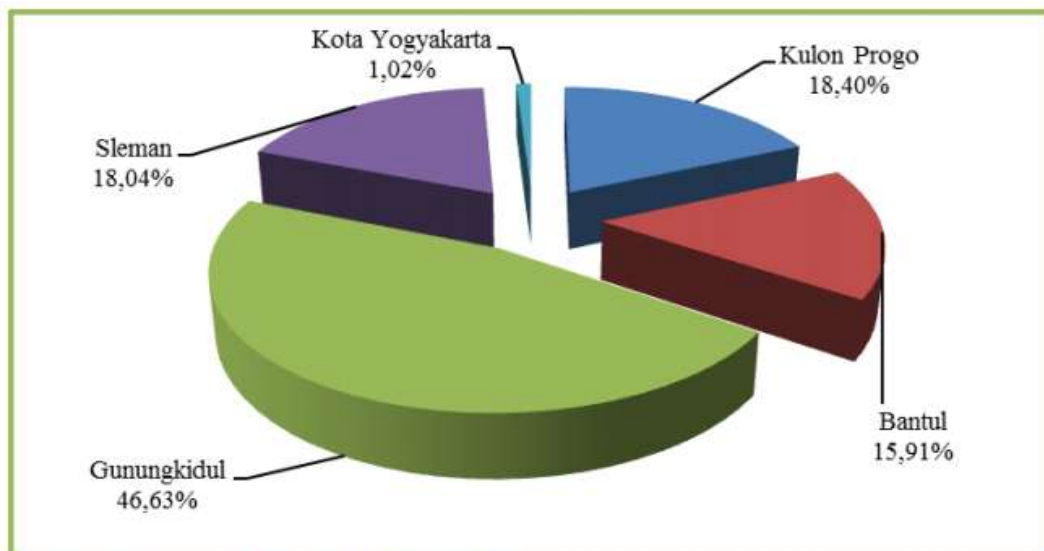
DIY Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.

4.1.2 Luas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°00'- 110°50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%);
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%);
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%).



Sumber : DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

Gambar 4. 2 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota

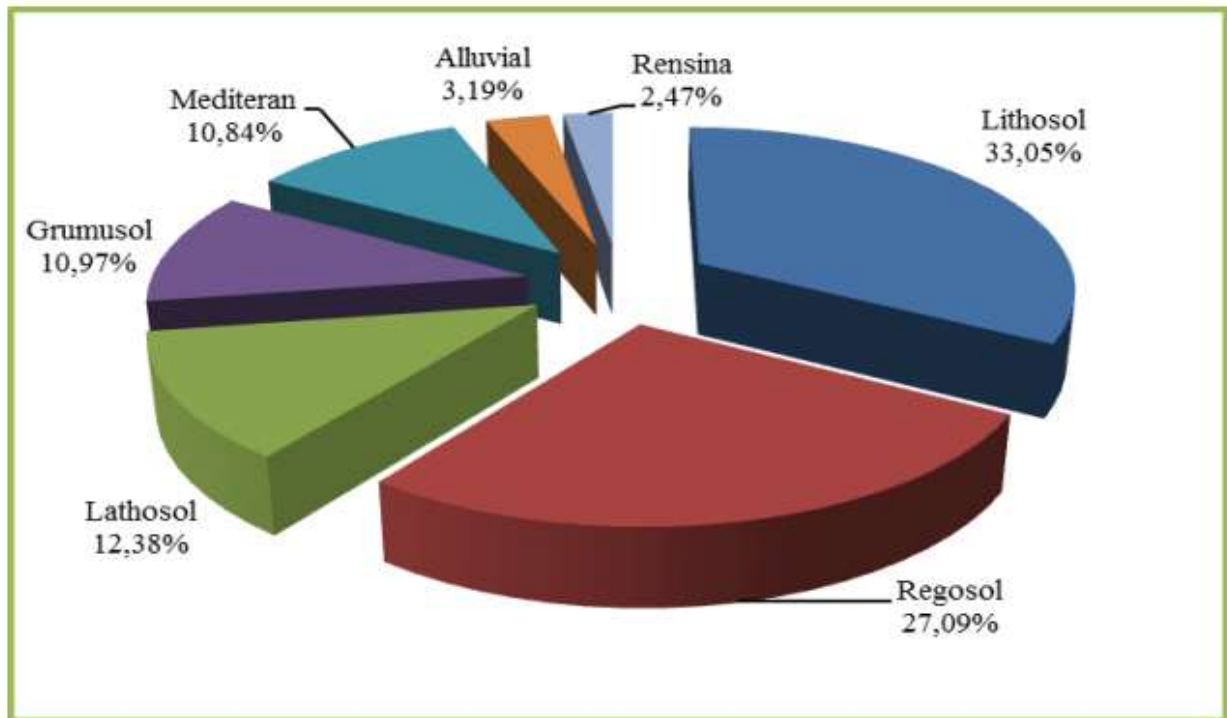
4.1.3 Topografi

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas \pm 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;

2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km^2 luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Rensina.



Sumber : DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

Gambar 4. 3 Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah

4.2 Jumlah Penduduk

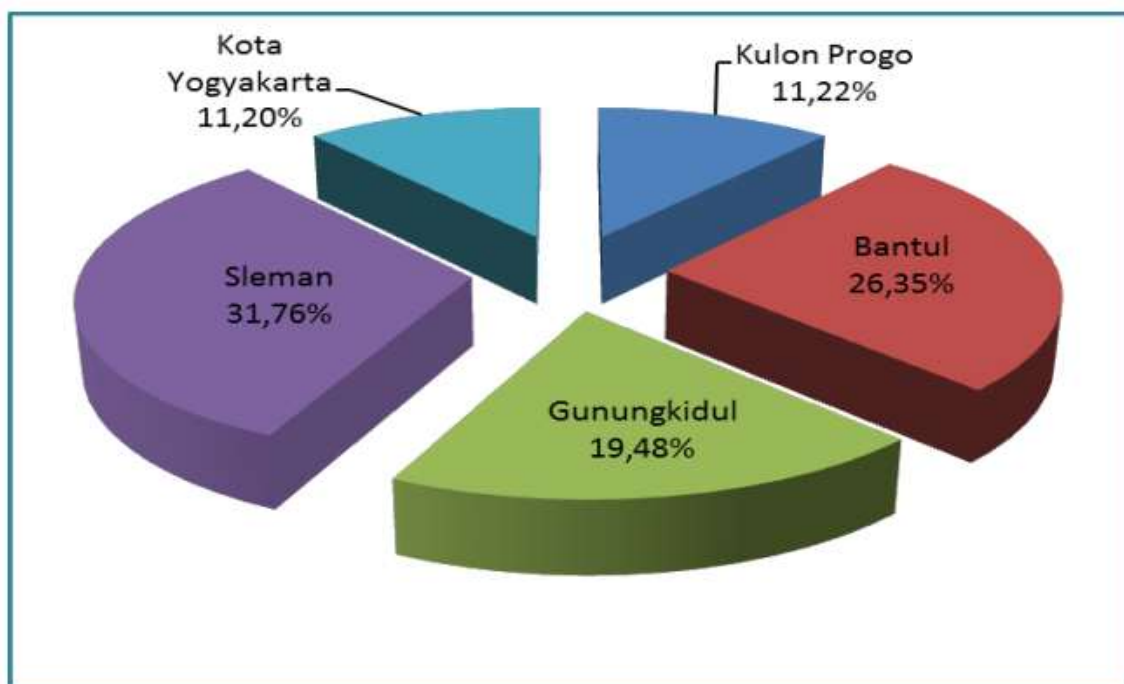
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin lakilaki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. *Sex ratio* penduduk DIY sebesar 97,73.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

| Kabupaten/Kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Sex Ratio |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Kota Yogyakarta | 189.137 | 199.490 | 388.627 | 94,81 |
| Bantul | 454.491 | 457.012 | 911.503 | 99,45 |
| Kulon Progo | 190.694 | 198.175 | 388.869 | 96,23 |
| Gunungkidul | 326.703 | 348.679 | 675.382 | 93,70 |
| Sleman | 547.885 | 545.225 | 1.093.110 | 100,49 |
| DIY | 1.708.910 | 1.748.581 | 3.457.491 | 97,73 |

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 menurut BPS sebanyak **3.594.854** jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak **1.775.872** jiwa dan perempuan sebanyak **1.818.982** jiwa. Persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 31,76%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 947.066 jiwa atau sebesar 26,35 %, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 700.192 jiwa atau sebesar 19,48%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 402.709 jiwa atau 11,20% dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk 403.203 jiwa atau sebesar 11,22% .



Sumber: *DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY*

Gambar 4. 4
Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2014

4.3 Indeks Pembangunan Manusia

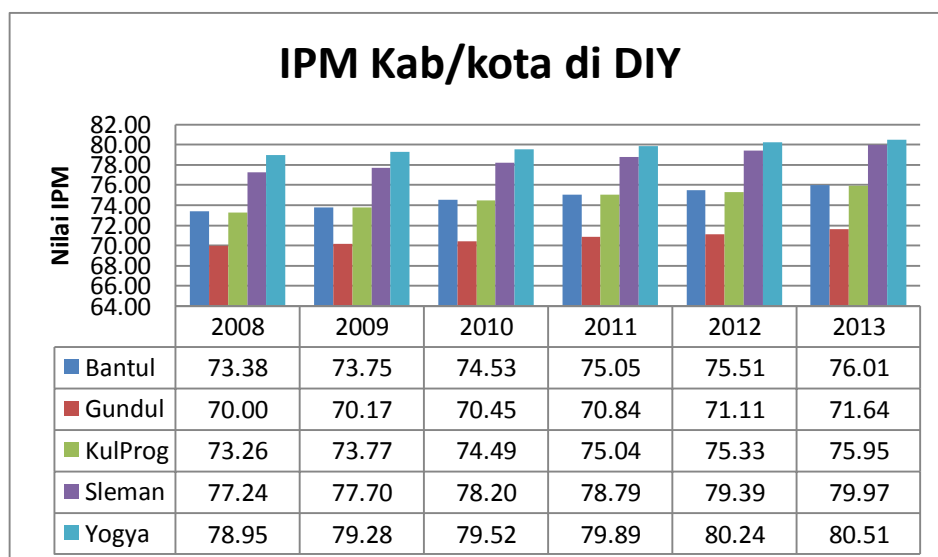
Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Tren dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Begitu juga, IPM DIY pada tahun 2013 menunjukkan capaian positif dimana IPM sebanyak 77,37 merupakan salah satu provinsi dengan capaian IPM tertinggi, karena rata-rata IPM nasional adalah sebesar 73,82.

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2013 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat ke-1 dengan angka 80,51. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman dengan angka 79,97. Sementara itu, tiga kabupaten lain dengan angka IPM yang relatif masih rendah adalah Kabupaten Bantul (76,01), Kulon Progo(75,95) dan Kabupaten Gunungkidul (71,64).

Tabel 4.2.
Perkembangan IPM

| Tahun | Bantul | Gundul | KulProg | Sleman | Yogya |
|-------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 2008 | 73.38 | 70.00 | 73.26 | 77.24 | 78.95 |
| 2009 | 73.75 | 70.17 | 73.77 | 77.70 | 79.28 |
| 2010 | 74.53 | 70.45 | 74.49 | 78.20 | 79.52 |
| 2011 | 75.05 | 70.84 | 75.04 | 78.79 | 79.89 |
| 2012 | 75.51 | 71.11 | 75.33 | 79.39 | 80.24 |
| 2013 | 76.01 | 71.64 | 75.95 | 79.97 | 80.51 |

Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta



Gambar 4.5
Perkembangan IPM

4.4 Pendapatan Perkapita

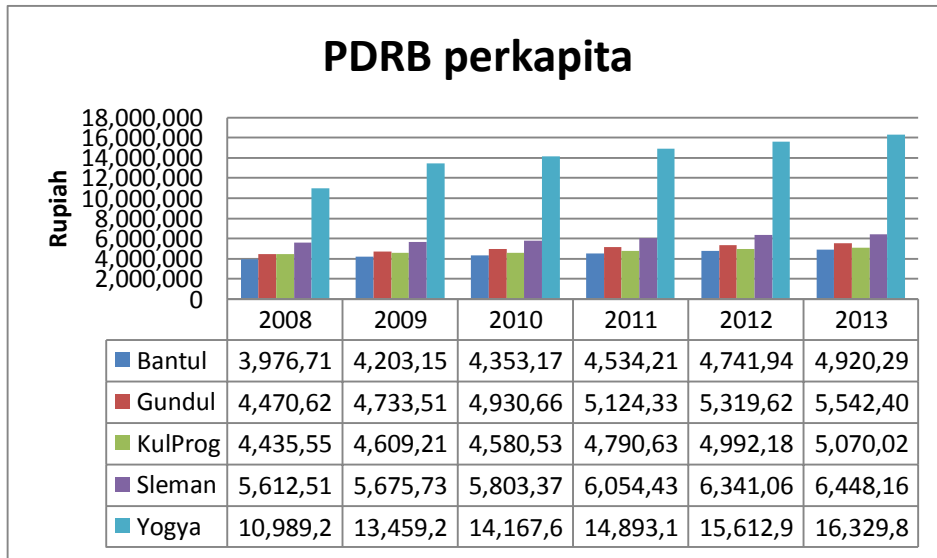
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah wilayah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur wilayah tersebut.

Tabel 4.3.
Perkembangan Pendapatan Perkapita
(rupiah)

| Tahun | Bantul | Gundul | KulProg | Sleman | Yogya |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2008 | 3,976,712 | 4,470,621 | 4,435,553 | 5,612,511 | 10,989,241 |
| 2009 | 4,203,156 | 4,733,514 | 4,609,219 | 5,675,733 | 13,459,208 |
| 2010 | 4,353,170 | 4,930,661 | 4,580,532 | 5,803,370 | 14,167,677 |
| 2011 | 4,534,212 | 5,124,333 | 4,790,630 | 6,054,435 | 14,893,159 |
| 2012 | 4,741,941 | 5,319,628 | 4,992,180 | 6,341,065 | 15,612,923 |
| 2013 | 4,920,292 | 5,542,401 | 5,070,022 | 6,448,165 | 16,329,898 |
| Rerata | 4,454,914 | 5,020,193 | 4,746,356 | 5,989,213 | 14,242,018 |

Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta



Gambar 4.6
Perkembangan Pendapatan Perkapita

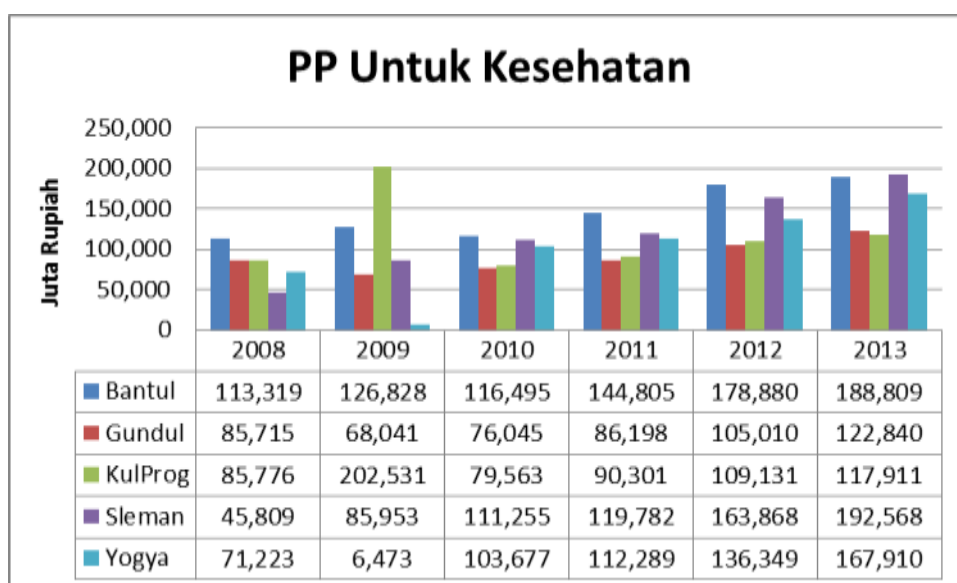
4.5 Pengeluaran Pemerintah daerah Bidang Kesehatan

Didalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah sangatlah diperlukan peranan yang dominan pemerintah di daerah tersebut, dimana pemerintah melakukan pembelanjaan, salah satunya adalah belanja pemerintah untuk kesehatan. Dengan harapan semakin besarnya belanja pemerintah untuk kesehatan semakin meningkat derajat kesehatan, dan berdampak dapat semakin besar pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 4.4
Perkembangan Pengeluaran pemerintah Bidang Kesehatan
(juta rupiah)

| | Bantul | Gundul | KulProg | Sleman | Yogya |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2008 | 113,319 | 85,715 | 85,776 | 45,809 | 71,223 |
| 2009 | 126,828 | 68,041 | 202,531 | 85,953 | 6,473 |
| 2010 | 116,495 | 76,045 | 79,563 | 111,255 | 103,677 |
| 2011 | 144,805 | 86,198 | 90,301 | 119,782 | 112,289 |
| 2012 | 178,880 | 105,010 | 109,131 | 163,868 | 136,349 |
| 2013 | 188,809 | 122,840 | 117,911 | 192,568 | 167,910 |
| Rerata | 144,856 | 90,641 | 114,202 | 119,872 | 99,654 |

Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta



Gambar 4.7
Perkembangan PP untuk Kesehatan

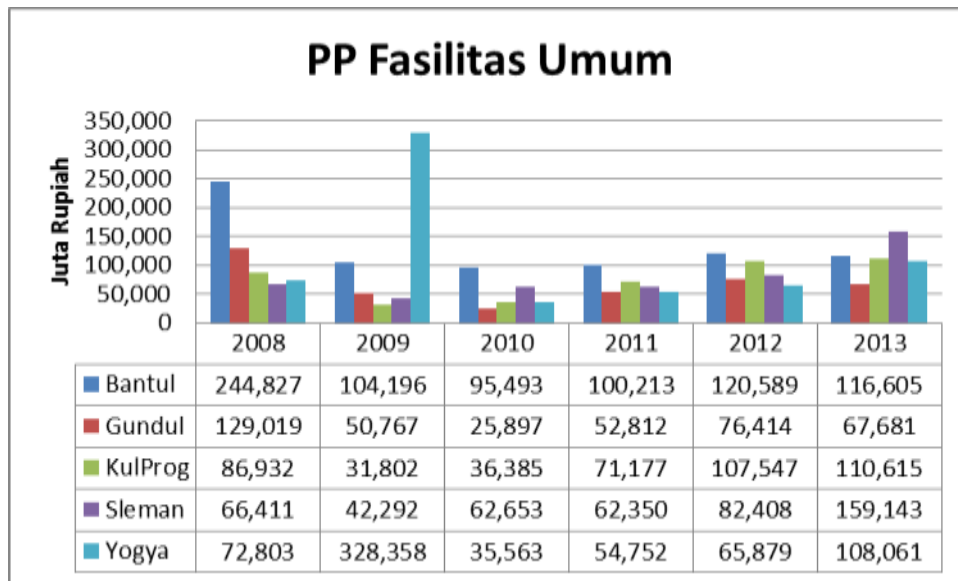
4.6 Pengeluaran Pemerintah Bidang Fasilitas Umum

Peranan yang dominan pemerintah di daerah salah satunya adalah pemerintah melakukan pembelanjaan untuk kesehatan fasilitas umum. Dengan harapan semakin besarnya belanja pemerintah untuk fasilitas umum akan meningkatkan efisiensi, dan berdampak pada daya saing yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 4.5
Perkembangan Pengeluaran pemerintah Bidang Fasilitas umum
(juta rupiah)

| | Bantul | Gundul | KulProg | Sleman | Yogya |
|--------|----------------|---------|---------|----------------|---------|
| 2008 | 244,827 | 129,019 | 86,932 | 66,411 | 72,803 |
| 2009 | 104,196 | 50,767 | 31,802 | 42,292 | 328,358 |
| 2010 | 95,493 | 25,897 | 36,385 | 62,653 | 35,563 |
| 2011 | 100,213 | 52,812 | 71,177 | 62,350 | 54,752 |
| 2012 | 120,589 | 76,414 | 107,547 | 82,408 | 65,879 |
| 2013 | 116,605 | 67,681 | 110,615 | 159,143 | 108,061 |
| Rerata | 130,321 | 67,098 | 74,076 | 79,210 | 110,903 |

Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta



Gambar 4.8
Perkembangan PP untuk Fasilitas Umum

4.7 Rasio Gini

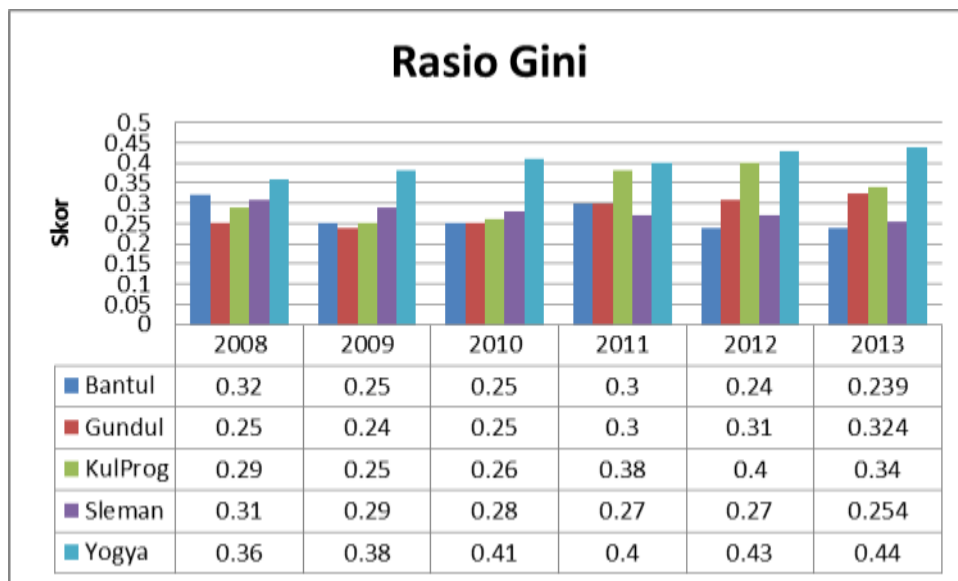
Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angka gini rasio berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Tabel 4.6
Perkembangan Gini Rasio

| Tahun | Bantul | Gundul | KulProg | Sleman | Yogya |
|-------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 2008 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.36 |
| 2009 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.38 |
| 2010 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.41 |
| 2011 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.27 | 0.4 |
| 2012 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.27 | 0.43 |
| 2013 | 0.239 | 0.324 | 0.34 | 0.254 | 0.44 |

Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta



Gambar 4.8
Perkembangan Rasio Gini

4.8 Jumlah Penduduk Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu

dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset (P2KP, Pedoman Umum, 2004:1).

Indikator kemiskinan pada satu rumah tangga yang ditentukan Badan pusat Statistik adalah :

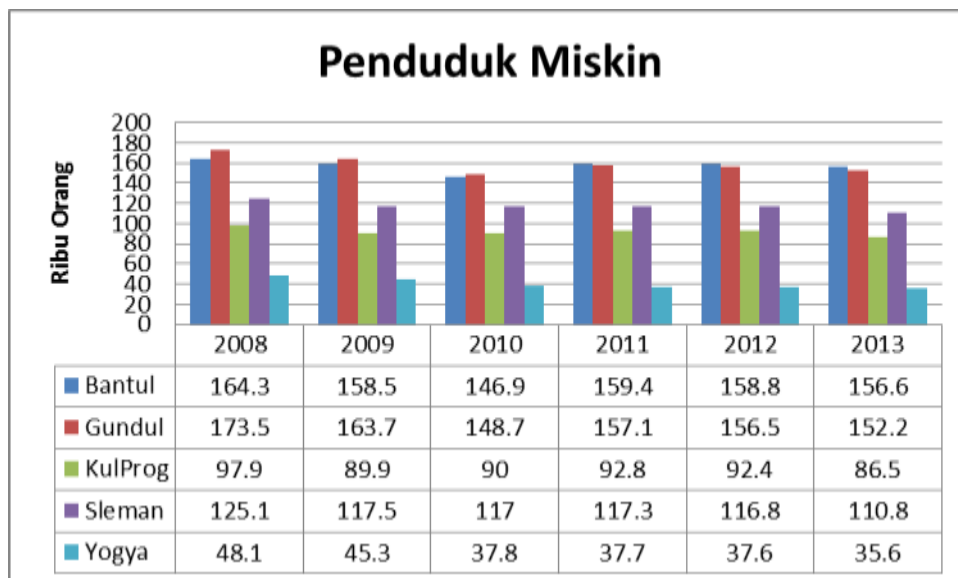
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata iar tidak terlindungi/sungai/ air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Tabel 4.7
Perkembangan Penduduk Miskin
(000 orang)

| Tahun | Bantul | Gundul | KulProg | Sleman | Yogya |
|-------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 2008 | 18.54 | 25.96 | 26.85 | 12.34 | 10.81 |
| 2009 | 17.64 | 24.44 | 24.65 | 11.45 | 10.05 |
| 2010 | 16.09 | 22.05 | 23.15 | 10.70 | 9.75 |
| 2011 | 17.28 | 23.03 | 23.62 | 10.61 | 9.62 |
| 2012 | 16.97 | 22.72 | 23.32 | 10.44 | 9.38 |
| 2013 | 16.48 | 21.70 | 21.39 | 9.68 | 8.82 |

Sumber : BPS Provinsi DI Yogyakarta



Gambar 4.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

5.1. Uji Kualitas Data

Berikut ini output hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 5.1
Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

| Variable | Coefficient | t-Statistic | Prob. |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| LOG(PDRBPERC?) | -0.564633 | -0.681746 | 0.5006 |
| LOG(PPKES?) | 0.078019 | 0.101422 | 0.9199 |
| LOG(PPFASUM?) | -1.418092 | -1.658184 | 0.1077 |
| RGINI? | 22.03158 | 1.783891 | 0.0846 |
| LOG(JPMIS?) | 2.053842 | 1.559589 | 0.1293 |

Sumber : Data diolah

Keterangan :

*** = signifikan 1% ** = signifikan 5% * = signifikan 10%

Dari tabel 5.1, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara variabel-variabel bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi (hubungan) antara satu dengan yang lain. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas akan tidak signifikan dan mempunyai standard error yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik (Santoso, 2005).

Hasil R² yang sangat tinggi namun sebagian besar variable independen yang tidak signifikan, hal ini menjadi gejala awal terjadinya multikolinieritas yang sempurna (lihat Gujarati, 200...). Dengan nilai R² sebesar 0,679 yang berarti nilainya tidak tinggi dan hampir sebagian besar variabel independen signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat kita deteksi tidak terjadi multikolinieritas.

5.2. Analisis Model Terbaik

Dalam analisa model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji Chow untuk menentukan apakah metode *Pooled least square* atau *Fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

TABEL 5.2
Hasil Regresi Data Panel

| Variabel Dependen : Penyerapan Tenaga Kerja | Model | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| | Common Effect | Fixed Effect | Random Effect |
| LOG(PDRBPERC?) | 0.217704 | 0.129856*** | 0.031921 |
| LOG(PPKES?) | 0.025665* | 0.004025 | 0.015277* |
| LOG(PPFASUM?) | 0.022976 | 0.003814 | 0.021683** |
| RGINI? | -0.184506 | -0.034652 | -0.306956** |
| LOG(JPMIS?) | 0.090915*** | 0.044438 | -0.068546** |
| R ² | 0.006024 | 0.982170 | 0.679578 |
| F _{statistik} | | 153.0104 | 12.30111 |
| Probabilitas | | 0.000000 | 0.000002 |
| Durbin-Watson stat | 0.096524 | 0.749834 | 0.224616 |

Sumber: Data diolah

Keterangan : *** = signifikan 1% ** = signifikan 5% * = signifikan 10%

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *Uji Likelihood* dan *Hausman Test* keduanya menyarankan untuk menggunakan *Fixed Effect*, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi Pengaruh Pendapatan perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah untuk fasilitas Umum, Rasio Gini dan jumlah Penduduk Misin terhadap Indek Pembangunan Manusia adalah *Random Effect Model*. Dipilihnya *Random Effect Model* karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen dari *Random Effect Model* lebih signifikan dibanding *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* yang masing-masing variabel independennya tidak signifikan sehingga model yang lebih baik yaitu *Random Effect Model*.

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data sample, uji Chow dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara metode *Pooled least square* atau *Fixed Effect*. Jika nilai F statistik pada uji Chow signifikan, maka uji Hausman akan dilakukan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hasil uji Hausman dengan nilai probabilitas yang kurang dari Alpha adalah signifikan, artinya metode *Fixed Effect* yang dipilih untuk mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan *Fixed Effect* dan *Random Effect* serta mengkombinasikan, baik *cross-section*, *period*, maupun gabungan *cross-section/period*.

5.3. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel

5.3.1. Uji Chow (Uji likelihood)

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Common/Pool Effect Model*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah **Common Effect Model**. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah **Fixed Effect Model**, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman.

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

- H0 : Common Effect Model atau pooled OLS
- H1 : Fixed Effect Model

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009). Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n - 1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Dimana:

SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect

SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect

n : Jumlah perusahaan (cross section)

nt : Jumlah cross section x jumlah time series

k : Jumlah variabel independen

Sedangkan F tabel didapat dari:

$$F\text{-tabel} = \{ \alpha : df (n - 1, nt - n - k) \}$$

Dimana:

α : Tingkat signifikansi yang dipakai (alfa)

n : Jumlah perusahaan (cross section)

nt : Jumlah cross section x jumlah time series

k : Jumlah variabel independen

$$\begin{aligned} F_{n-1, nt, n-k} (\text{ROE}) &= \frac{(0.068 - 0.00123)/(5 - 1)}{0.00123/(35 - 5 - 6)} \\ &= 331.7 \\ F\text{-tabel} &= \alpha ; df (n-1, nT-n-k) \\ &= 5\% ; (5 - 1, 5.7 - 5 - 6) \\ &= 5\% ; (4, 24) \\ &= 2,776 \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan F-hitung didapat sebesar 331.7 sedangkan F-tabel dari numerator 4 dan denumenator 24 pada α : 5% adalah 2,776. Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena F-hitung lebih besar dari F-tabel ($331.7 > 2,776$), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah **Fixed Effect Model**.

5.3.2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *Random Effect* dengan *Fixed Effect*. Jika dari hasil Uji Hausman tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *Random Effect*. Akan tetapi, jika

hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

TABEL 5.3
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: IPMPANEL
Test period random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|---------------|-------------------|--------------|--------|
| Period random | 1.844349 | 5 | 0.8702 |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel Uji Hausman, nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 0,87 yang lebih besar dari Alpha 0,05 sehingga menerima hipotesis nol. Jadi menurut uji hausman, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode ***Random Effect***.

5.4. Hasil Estimasi Model Data Panel Random Effect Model

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS)

Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 kabupaten/kota selama periode 2008-2014 (7 tahun).

TABEL 5.4
Hasil Estimasi Random Effect Model

| Variabel Dependen : LOG(IPM) | Model Random Effect |
|---|--------------------------------------|
| Konstanta | 3.81705 |
| Standar error | 0.52819 |
| Probabilitas | 0.00000*** |
| LOG(PDRBperc) | 0.03192 |
| Standar error | 0.02719 |
| Probabilitas | 0.25000 |
| LOG(PPKES) | 0.01528 |
| Standar error | 0.00836 |
| Probabilitas | 0.07800* |
| LOG(PPFASUM) | 0.02168 |
| Standar error | 0.00915 |
| Probabilitas | 0.02500** |
| RGINI | -0.30700 |
| Standar error | 0.13324 |
| Probabilitas | 0.02900** |
| LOG(JPMIS) | -0.06850 |
| Standar error | 0.02618 |
| Probabilitas | 0.0139** |
| R² | 0.67958 |
| F_{statistik} | 12.30111 |
| Probabilitas | 0.00000 |
| Durbin-Watson stat | 0.22462 |

Sumber: Hasil Pengolahan data panel

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Indek Pembangunan Masyarakat disetiap kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di interpretasikan sebagai berikut:

$$\text{LOG (IPM)} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{LOG(PDRBPerc)} + \beta_2 \cdot \text{LOG(PPKES)} - \beta_3 \cdot \text{LOG(PPFASUM)} + \beta_4 \cdot \text{RGINI} + \beta_5 \cdot \text{LOG(JPMIS)} + \text{et}$$

Keterangan:

| | | |
|---------------------|---|--|
| IPM | = | Indek Pembangunan Manusia |
| PDRBPerc | = | Pendapatan Perkapita Kabupaten/kota |
| PPKES | = | Pengeluaran Pemerintah Daerah Untuk Kesehatan |
| PPFASUM | = | Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk fasilitas Umum |
| RGINI | = | Rasio Gini |
| JPMIS | = | Jumlah Penduduk Misin |
| β_0 | = | Konstanta |
| $\beta_1 - \beta_5$ | = | Koefisien Parameter |
| et | = | Disturbance Error |

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$\text{LOG(IPM)} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{LOG(PDRBPerc)} + \beta_2 \cdot \text{LOG(PPKES)} - \beta_3 \cdot \text{LOG(PPFASUM)} + \beta_4 \cdot \text{RGINI} + \beta_5 \cdot \text{LOG(JPMIS)} + \text{et}$$

$$\text{LOG(IPM)} = 3.817 + 0.0319 \cdot \text{LOG(PDRBPERC)} + 0.0153 \cdot \text{LOG(PPKES)} + 0.0217 \cdot \text{LOG(PPFASUM)} - 0.307 \cdot \text{RGINI} - 0.068 \cdot \text{LOG(JPMIS)}$$

- β_1 = Nilai 0.032 dapat diartikan bahwa ketika Pendapatan perkapita naik sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 0.032% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.
- β_2 = Nilai 0.0153 dapat diartikan bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah daerah untuk kesehatan meningkat sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 0.0153% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.
- β_3 = Nilai 0.0217 dapat diartikan bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah daerah untuk fasilitas umum naik sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 0.0217% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.
- β_4 = Nilai -0.307 dapat diartikan bahwa ketika Gini Rasio naik sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar 0.307% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.

B₅ = Nilai 0.068 dapat diartikan bahwa ketika Jumlah Penduduk Miskin naik sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar 0.068% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.

Dari tabel 5.4, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diinterpretasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM_BANTUL)} = & \text{PER_EFFECT} + 3.817 + \\ & 0.0319 * \text{LOG(PDRBPERC_BANTUL)} + \\ & 0.0153 * \text{LOG(PPKES_BANTUL)} + \\ & 0.0217 * \text{LOG(PPFASUM_BANTUL)} - \\ & 0.307 * \text{RGINI_BANTUL} - 0.068 * \text{LOG(JPMIS_BANTUL)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM_GUNDUL)} = & \text{PER_EFFECT} + 3.817 + \\ & 0.0319 * \text{LOG(PDRBPERC_GUNDUL)} + \\ & 0.0153 * \text{LOG(PPKES_GUNDUL)} + \\ & 0.0217 * \text{LOG(PPFASUM_GUNDUL)} - \\ & 0.307 * \text{RGINI_GUNDUL} - \\ & 0.0685 * \text{LOG(JPMIS_GUNDUL)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM_KULONPROGO)} = & \text{PER_EFFECT} + 3.81704975567 + \\ & 0.0319212348385 * \text{LOG(PDRBPERC_KULONPROGO)} \\ & + 0.0152774311838 * \text{LOG(PPKES_KULONPROGO)} + \\ & 0.0216833690388 * \text{LOG(PPFASUM_KULONPROGO)} - \\ & 0.306955918125 * \text{RGINI_KULONPROGO} - \\ & 0.068545628375 * \text{LOG(JPMIS_KULONPROGO)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM_SLEMAN)} = & \text{PER_EFFECT} + 3.81704975567 + \\ & 0.0319212348385 * \text{LOG(PDRBPERC_SLEMAN)} + \\ & 0.0152774311838 * \text{LOG(PPKES_SLEMAN)} + \\ & 0.0216833690388 * \text{LOG(PPFASUM_SLEMAN)} - \\ & 0.306955918125 * \text{RGINI_SLEMAN} - \\ & 0.068545628375 * \text{LOG(JPMIS_SLEMAN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM_YOGYAKARTA)} = & \text{PER_EFFECT} + 3.81704975567 + \\ & 0.0319 * \text{LOG(PDRBPERC_YOGYAKARTA)} + \\ & 0.0152774311838 * \text{LOG(PPKES_YOGYAKARTA)} + \\ & 0.0216833690388 * \text{LOG(PPFASUM_YOGYAKARTA)} - \\ & 0.306955918125 * \text{RGINI_YOGYAKARTA} - \\ & 0.068545628375 * \text{LOG(JPMIS_YOGYAKARTA)} \end{aligned}$$

Pada model estimasi di atas, terlihat bahwa tidak adanya pengaruh variabel Random Effect di setiap kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Indeks Pembangunan Manusia di setiap Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena luas Daerah Istimewa Yogyakarta sangat kecil, sehingga tidak ada batas setiap wilayah kabupaten/kota, penduduk sangat mudah untuk berpindah aktivitas ekonomi, menyekolahkan anak-anak mereka di kabupaten lain, serta mencari fasilitas kesehatan di tempat lain.

5.5. Pembahasan

5.5.1. Pengaruh pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis diatas (table 5.4) terlihat bahwa pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena nilai probabilitas $0.25 > 0.05$. Pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap IPM dapat dianalisis melalui pertumbuhan rata-rata pendapatan perkapita di 5 kabupaten/kota selama tahun 2008-2014 meningkat sebesar 29 persen, tetapi IPM pada periode itu 3.02 persen, sehingga dapat disimpulkan kenaikan rata-rata pendapatan perkapita belum bisa mendorong kenaikan perkapita, dengan kata lain kenaikan pendapatan perkapita belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Menurut Mazumdar dalam Rana dan Dzathor (2008) terdapat empat teori yang menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan pembangunan manusia yang masing-masing teori didukung oleh hasil penelitian empiris. Salah satunya menyatakan bahwa perubahan pendapatan

nasional tidak berhubungan dengan perubahan pembangunan manusia. Karena dapat saja pertumbuhan ekonomi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan individu.

Rana dan Dzathor (2008) melakukan penelitian terhadap hubungan antara indikator-indikator dalam IPM dengan pendapatan per kapita menggunakan data Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang tahun 1995-2004. IPM diukur menggunakan 5 indikator, yaitu kondisi lingkungan, kesehatan, perubahan teknologi, kekayaan, kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara indikator-indikator IPM dengan pendapatan per kapita.

5.5.2. Pengaruh Pengeluaran Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari table 5.4 dapat kita lihat bahwa Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (nilai probabilitas $0.078 < 0.10$), karena Kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas SDM, SDM meningkat akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat, yang pada ujungnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Kesehatan merujuk pada ketersediaan gizi yang cukup dan pelayanan kesehatan yang memadai demi mengurangi angka kematian bayi dan ibu

5.5.3. Pengaruh Pengeluaran Untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis dapat kita lihat bahwa ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah untuk fasilitas umum dengan Indeks Pembangunan manusia (nilai probabilitas $0.025 < 0.05$), peningkatan fasilitas umum berakibat pada ekonomi biaya murah, ekonomi biaya murah berarti telah terjadi peningkatan skala ekonomi dan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

5.5.4. Pengaruh Rasio Gini terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis terdapat hubungan negative signifikan antara rasio gini dan indeks pembangunan manusia (Hal ini karena nilai probabilitas $0.029 < 0,05$), kenaikan rasio gini berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dan akhirnya dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.

5.5.5. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis diatas bahwa jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (nilai probabilitas $0.0139 < 0.05$), Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan

kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan berdampak pada turunnya produktivitas sebagian masyarakat, turunnya produktivitas masyarakat berakibat pada bertambahnya orang miskin baru, dan pada gilirannya akan menurunkan Indeks Pembangunan manusia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena nilai probabilitas $0.25 > 0.05$, perubahan pendapatan perkapita tidak berhubungan dengan perubahan pembangunan manusia. Karena dapat saja pertumbuhan pendapatan perkapita tidak mampu meningkatkan kesejahteraan individu akibat pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan.
2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (nilai probabilitas $0.078 < 0.10$), karena Kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas SDM, SDM meningkat akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat, yang pada ujungnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Dari hasil analisis dapat kita lihat bahwa ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah untuk fasilitas umum dengan Indeks Pembangunan manusia (nilai probabilitas $0.025 < 0.05$), peningkatan fasilitas umum berakibat pada ekonomi biaya murah, ekonomi biaya murah berarti telah terjadi peningkatan skala ekonomi dan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

4. Rasio gini dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negative signifikan (Hal ini karena nilai probabilitas $0.029 < 0,05$), kenaikan rasio gini berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dan akhirnya dapat menurunkan indek pembangunan manusia.
5. Hasil analisis diatas bahwa jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Indek Pembangunan Manusia (nilai probabilitas $0.0139 < 0.05$), Kemiskinan berdampak pada turunnya produktivitas sebagian masyarakat, turunnya produktivitas masyarakat berakibat pada bertambahnya orang miskin baru, dan pada gilirannya akan menurunkan Indek Pembangunan manusia.

6.2. Saran

Dari hasil analisis dapat kita ambil langkah-langkah untuk memperbaiki Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu kebijakan penganggaran dengan memperbesar komposisi anggaran belanja supaya lebih terfokus pada program sasaran, dan memperkecil belanja yang berupa upah/gaji/honor birokrat atau mitra pelaksana program. Program sasaran yang dimaksud adalah di bidang kesehatan, dan bidang peningkatan fasilitas umum untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai bekal mencapai kehidupan yang layak.

2. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu terus menerus dilakukan dengan prioritas pada variabel gini ratio, belanja daerah, laju pertumbuhan ekonomi, yang merupakan cerminan dari besarnya pendapatan masyarakat, adanya ketimpangan pendapatan, anggaran belanja daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik , 2007.. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- _____. 2008. *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- _____. 2007. *Data dan Informasi Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2006 - 2014. *Daerah istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____. 2014. *Profil Ketenagakerjaan Daerah istimewa Yogyakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta, Yogyakarta.
- _____. 2006-2004. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Daerah istimewa Yogyakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____. 2006-2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____. 2007. *Statistik Sosial dan Kependudukan Daerah istimewa Yogyakarta Hasil SUSENAS 2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001-2004. *Indonesia Human Development Report 2001-2004*. BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia. Jakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi 2002, "Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Indonesia ", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 22. (2002), hal. 113-122.
- Gujarati, Damodar.2007 *Dasar-dasar Ekonometrika*. Terjemahan oleh Julius A. Mulyadi. Penerbit Erlangga, Jakarta. (On-line) diakses tanggal 17 januari 2011.
- Ginting, Charisma Kuriata S. 2008. "Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia". *Tesis*. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. (Tidak dipublikasikan).

- Handayani, Titik. 2008. *Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta.
- Harjowiryo, Marwanto. 2009. "Kebijakan Penganggaran dan Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia". *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Hausman, J. A, 1978, "Specification Test in Econometrics ", *Econometrica Journal*, Vol. 46, No. 6. (November, 1978), pp. 1251-1271.
- Hsiao, Cheng. 2003. *Analysis of Panel Data*. Second Edition. Cambridge University Press (On-line), diakses tanggal 18 Januari 2011.
- Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart, 1998. Economic Growth and Human Capital. *QEH Working Paper No. 18*.
- Richard, Pierre Agenor. *The Economics of Adjustment and Growth*. LA Editorial UPR (On-line), diakses tanggal 21 September 2011.
- Saleh,Samsubar 2002, Jurnal Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia ,Kajian Ekonomi Negara Berkembang *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Hal: 87 – 102 JEP Vol 7, No. 2, 2002 87
- Sanjoyo. 2009. *Forum Diskusi Ekonometrik* (On-line), diakses tanggal 29 Agustus 2011
- Amartya. 1992. "*Inequality Reexamined*". Oxford University Press Inc. New York. (On-line), diakses tanggal 29 Agustus 2011
- Sukirno, Sadono.2000 *Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji A.I. Erlangga. Jakarta (On-line)
- UNDP. 1990 – 2009. *Human Development Report*. UNDP (On-line), diakses tanggal 30 Januari 2011
- Widarjono, Agus.2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi kedua. Ekonisa FE UII, Yogyakarta.
- Yuwanti,Sri .2004,"Penelitian Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah". Balitbang Prov.Jawa Tengah.

LAMPIRAN

| DAERAH | Tahun | IPM | PDRBPerc | PPKES | PPEDU | RGini | JPMis |
|-------------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-------|--------|
| Kab. Bantul | 2008 | 73.38 | 3976712 | 113319.35 | 85063.95 | 0.32 | 164.3 |
| | 2009 | 73.75 | 4203156 | 126827.67 | 614833.69 | 0.25 | 158.5 |
| | 2010 | 74.53 | 4353170 | 116495.12 | 526168.55 | 0.25 | 146.9 |
| | 2011 | 75.05 | 4534212 | 144805.24 | 616622.76 | 0.3 | 159.4 |
| | 2012 | 75.51 | 4741941 | 178879.95 | 671242.30 | 0.24 | 158.8 |
| | 2013 | 76.01 | 4920292 | 188808.96 | 646616.13 | 0.239 | 156.6 |
| | 2014 | 76.68 | 5106443 | 214835.10 | 674820.44 | 0.228 | 154.9 |
| Kab. Gunung Kidul | 2008 | 70.00 | 4470621 | 85715.21 | 114458.08 | 0.25 | 173.5 |
| | 2009 | 70.17 | 4733514 | 68040.89 | 477210.57 | 0.24 | 163.7 |
| | 2010 | 70.45 | 4930661 | 76044.54 | 426092.68 | 0.25 | 148.7 |
| | 2011 | 70.84 | 5124333 | 86197.95 | 540484.02 | 0.3 | 157.1 |
| | 2012 | 71.11 | 5319628 | 105010.13 | 603757.48 | 0.31 | 156.5 |
| | 2013 | 71.64 | 5542401 | 122839.62 | 681462.16 | 0.324 | 152.2 |
| | 2014 | 71.77 | 5751284 | 133275.52 | 722096.92 | 0.342 | 151.08 |
| Kab. Kulon Progo | 2008 | 73.26 | 4435553 | 85776.41 | 80838.17 | 0.29 | 97.9 |
| | 2009 | 73.77 | 4609219 | 202530.63 | 28317.48 | 0.25 | 89.9 |
| | 2010 | 74.49 | 4580532 | 79563.02 | 320059.10 | 0.26 | 90 |
| | 2011 | 75.04 | 4790630 | 90301.35 | 402045.21 | 0.38 | 92.8 |
| | 2012 | 75.33 | 4992180 | 109131.47 | 448020.21 | 0.4 | 92.4 |
| | 2013 | 75.95 | 5070022 | 117911.38 | 461432.70 | 0.34 | 86.5 |
| | 2014 | 76.56 | 5199488 | 132999.59 | 498901.00 | 0.37 | 84.3 |
| Kab. Sleman | 2008 | 77.24 | 5612511 | 45808.79 | 17835.80 | 0.31 | 125.1 |
| | 2009 | 77.70 | 5675733 | 85953.01 | 583207.14 | 0.29 | 117.5 |
| | 2010 | 78.20 | 5803370 | 111254.81 | 575956.24 | 0.28 | 117 |
| | 2011 | 78.79 | 6054435 | 119781.99 | 646971.53 | 0.27 | 117.3 |
| | 2012 | 79.39 | 6341065 | 163867.77 | 721680.13 | 0.27 | 116.8 |
| | 2013 | 79.97 | 6448165 | 192568.35 | 779972.42 | 0.254 | 110.8 |
| | 2014 | 80.43 | 6631746 | 291217.02 | 856881.02 | 0.244 | 110.1 |
| Kota Yogyakarta | 2008 | 78.95 | 10989241 | 71223.45 | 92758.60 | 0.36 | 48.1 |
| | 2009 | 79.28 | 13459208 | 6473.44 | 61621.83 | 0.38 | 45.3 |
| | 2010 | 79.52 | 14167677 | 103677.31 | 355290.48 | 0.41 | 37.8 |
| | 2011 | 79.89 | 14893159 | 112289.14 | 409984.30 | 0.4 | 37.7 |
| | 2012 | 80.24 | 15612923 | 136348.92 | 442022.11 | 0.43 | 37.6 |
| | 2013 | 80.51 | 16329898 | 167909.70 | 404537.45 | 0.44 | 35.6 |
| | 2014 | 81.03 | 17048561 | 192156.10 | 449635.72 | 0.45 | 35.5 |

Hasil Regresi Model OLS

Dependent Variable: LOG(IPM?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/06/16 Time: 21:48
 Sample: 2008 2014
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 35

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| LOG(PDRBPERC?) | 0.217704 | 0.014205 | 15.32579 | 0.0000 |
| LOG(PPKES?) | 0.025665 | 0.013194 | 1.945214 | 0.0612 |
| LOG(PPFASUM?) | 0.022976 | 0.014668 | 1.566394 | 0.1277 |
| RGINI? | -0.184506 | 0.211825 | -0.871029 | 0.3907 |
| LOG(JPMIS?) | 0.090915 | 0.022587 | 4.025116 | 0.0004 |
| R-squared | 0.006024 | Mean dependent var | | 4.328404 |
| Adjusted R-squared | -0.126506 | S.D. dependent var | | 0.045141 |
| S.E. of regression | 0.047912 | Akaike info criterion | | -3.107346 |
| Sum squared resid | 0.068866 | Schwarz criterion | | -2.885153 |
| Log likelihood | 59.37855 | Hannan-Quinn criter. | | -3.030645 |
| Durbin-Watson stat | 0.096524 | | | |

Hasil Regresi Model FIXED EFFECT

Dependent Variable: LOG(IPM?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/06/16 Time: 21:47
 Sample: 2008 2014
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 35

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 2.011648 | 0.531633 | 3.783903 | 0.0009 |
| LOG(PDRBPERC?) | 0.129856 | 0.026084 | 4.978317 | 0.0000 |
| LOG(PPKES?) | 0.004025 | 0.002763 | 1.456509 | 0.1577 |
| LOG(PPFASUM?) | 0.003814 | 0.002720 | 1.402311 | 0.1731 |
| RGINI? | -0.034652 | 0.035627 | -0.972630 | 0.3401 |
| LOG(JPMIS?) | 0.044438 | 0.037454 | 1.186468 | 0.2466 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _BANTUL--C | 0.006999 | | | |
| _GUNDUL--C | -0.059857 | | | |
| _KULONPROGO--C | 0.028383 | | | |
| _SLEMAN--C | 0.034946 | | | |
| _YOGYAKARTA--C | -0.010471 | | | |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.982170 | Mean dependent var | 4.328404 |
| Adjusted R-squared | 0.975751 | S.D. dependent var | 0.045141 |
| S.E. of regression | 0.007030 | Akaike info criterion | -6.842435 |
| Sum squared resid | 0.001235 | Schwarz criterion | -6.398050 |
| Log likelihood | 129.7426 | Hannan-Quinn criter. | -6.689033 |
| F-statistic | 153.0104 | Durbin-Watson stat | 0.749834 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Hasil Regresi RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOG(IPM?)
 Method: Pooled EGLS (Period random effects)
 Date: 06/06/16 Time: 21:42
 Sample: 2008 2014
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 35
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 3.817050 | 0.528187 | 7.226706 | 0.0000 |
| LOG(PDRBPERC?) | 0.031921 | 0.027193 | 1.173891 | 0.2500 |
| LOG(PPKES?) | 0.015277 | 0.008356 | 1.828273 | 0.0778 |
| LOG(PPFASUM?) | 0.021683 | 0.009153 | 2.368935 | 0.0247 |
| RGINI? | -0.306956 | 0.133241 | -2.303771 | 0.0286 |
| LOG(JPMIS?) | -0.068546 | 0.026182 | -2.618091 | 0.0139 |
| Random Effects (Period) | | | | |
| 2008--C | 0.000000 | | | |
| 2009--C | 0.000000 | | | |
| 2010--C | 0.000000 | | | |
| 2011--C | 0.000000 | | | |
| 2012--C | 0.000000 | | | |
| 2013--C | 0.000000 | | | |
| 2014--C | 0.000000 | | | |

| Effects Specification | | S.D. | Rho |
|-----------------------|--|----------|--------|
| Period random | | 0.000000 | 0.0000 |
| Idiosyncratic random | | 0.029892 | 1.0000 |

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.679578 | Mean dependent var | 4.328404 |
| Adjusted R-squared | 0.624332 | S.D. dependent var | 0.045141 |
| S.E. of regression | 0.027668 | Sum squared resid | 0.022200 |
| F-statistic | 12.30111 | Durbin-Watson stat | 0.224616 |
| Prob(F-statistic) | 0.000002 | | |

| Unweighted Statistics | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.679578 | Mean dependent var | 4.328404 |
| Sum squared resid | 0.022200 | Durbin-Watson stat | 0.224616 |

UJI HAUSMAN TEST

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: IPMPANEL

Test period random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Period random | 1.844349 | 5 | 0.8702 |

** WARNING: estimated period random effects variance is zero.

Period random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------------|-----------|-----------|------------|--------|
| LOG(PDRBPERC?) | 0.026896 | 0.031921 | 0.000066 | 0.5347 |
| LOG(PPKES?) | 0.011897 | 0.015277 | 0.000071 | 0.6877 |
| LOG(PPFASUM?) | 0.025591 | 0.021683 | 0.000053 | 0.5922 |
| RGINI? | -0.367633 | -0.306956 | 0.006076 | 0.4363 |
| LOG(JPMIS?) | -0.077058 | -0.068546 | 0.000126 | 0.4485 |

Period random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(IPM?)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/06/16 Time: 21:46

Sample: 2008 2014

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 3.948778 | 0.629264 | 6.275236 | 0.0000 |
| LOG(PDRBPERC?) | 0.026896 | 0.028372 | 0.947996 | 0.3530 |
| LOG(PPKES?) | 0.011897 | 0.011854 | 1.003615 | 0.3260 |
| LOG(PPFASUM?) | 0.025591 | 0.011705 | 2.186372 | 0.0392 |
| RGINI? | -0.367633 | 0.154368 | -2.381541 | 0.0259 |
| LOG(JPMIS?) | -0.077058 | 0.028489 | -2.704810 | 0.0126 |

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.703367 | Mean dependent var | 4.328404 |
| Adjusted R-squared | 0.561499 | S.D. dependent var | 0.045141 |
| S.E. of regression | 0.029892 | Akaike info criterion | -3.916564 |
| Sum squared resid | 0.020552 | Schwarz criterion | -3.383301 |
| Log likelihood | 80.53986 | Hannan-Quinn criter. | -3.732482 |
| F-statistic | 4.957904 | Durbin-Watson stat | 0.241116 |
| Prob(F-statistic) | 0.000598 | | |

BIODATA KETUA TIM PENELITIAN

Nama : AGUS TRI BASUKI, SE.,MSi.
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Perum. Griya Ketawang Permai C 6
Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta 5
No.telp / Hp. : 0816676907
e-mail : agustribasuki@yahoo.com

PENDIDIKAN

1. Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lulus tahun1993
2. Magister Sains Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Lulus tahun 2000

PENGALAMAN KERJA

1. Staf Pengajar Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1994-sekarang)
2. Staf Pengajar Tidak Tetap Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (1996-2005)
3. Staf Pengajar Tidak Tetap LP3i Bandung (1998-1999)
4. Staf Pengajar Tidak Tetap Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2001-2005)
5. Staf Pengajar Tidak Tetap STIE IEU Yogyakarta (2001-sekarang)
6. Peneliti di Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2003-2008)
7. Peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM Yogyakarta (2005)
8. Reviewer Hibah Dikti Tahun 2009

HASIL KARYA ILMIAH

1. PUBLIKASI

1. Analisa Tingkat Tarif Proteksi Efektif di sektor Industri Indonesia tahun 1995 Studi Empiris dalam menyongsong diberlakukannya AETA (2000) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
2. Aplikasi Model Berdasarkan Asumsi Ekspektasi Adaptif dan antisipasi Sempurna pada Permintaan uang di Indonesia tahun 1978 - 1997 (2000) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan) ,
3. Kepanikan Fiskal dan Ancaman Pemulihan Ekonomi (2001) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
4. Pengaruh Kebijakan Ekonomi dalam Bidang Perbankan terhadap Permintaan Uang (Studi Kasus Indonesia 1978 - 1999) ((2001) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
5. Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan BBM Terhadap Fungsi Intlasi di Indonesia (1991-2001) (2002) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
6. Analisis Kebijakan APBD Dari Aspek Implementasi Diberlakukan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemkot Yogyakarta DIY 1992 – 2002) (2004) (Jurnal

- Ekonomi & Studi Pembangunan)
7. Peranan Kabupaten Way Kanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto Propinsi Lampung Tahun 1999-2002. (2005) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
 8. Analisis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Propinsi Maluku Tahun 2000-2004. (2006) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan).
 9. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Pasca Gempabumi Kabupaten Bantul (2008) (Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan)
 10. Evaluasi Penanganan Pasca Gempa Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2008 (2009) (Jurnal Ekonomi Universitas Tri Sakti Jakarta)
 11. Analisis Potensi Unggulan kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Menopang Pembangunan Propinsi Papua Tahun 2004-2008 (2010) (Jurnal UNISIA Universitas Islam Indonesia)

2. Karya Ilmiah

1. Pengaruh Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 terhadap Permintaan Uang Indonesia tahun 1969.2 - 1991.4 (1993) Didanai LP3 UMY dan Kopertis Wilayah V Yogyakarta
2. Analisa Tingkat Tarif Proteksi Efektif di sektor Industri Indonesia tahun 1995 Studi Empiris dalam menyongsong diberlakukannya AETA (2000) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
3. Aplikasi Model Berdasarkan Asumsi Ekspektasi Adaptif dan antisipasi Sempurna pada Permintaan uang di Indonesia tahun 1978 - 1997 (2000) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan) Didanai LP3 UMY Rp. 1.500.000,
4. Kepanikan Fiskal dan Ancaman Pemulihan Ekonomi (2001) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
5. Pengaruh Kebijakan Ekonomi dalam Bidang Perbankan terhadap Permintaan Uang (Studi Kasus Indonesia 1978 - 1999) ((2001) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan) Didanai LP3 UMY Rp. 1.500.000,
6. Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan BBM Terhadap Fungsi Intlasi di Indonesia (1991-2001) (2002) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan) Didanai LP3 Rp.1.500.000,
7. Prospek Investasi Dalam Kerangka KPPE di Kecamatan Temon dan Kecamatan Sentolo di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (2003) didanai LP3 UMY Rp. 2.500.000
8. Analisis Kebijakan APBD Dari Aspek Implementasi Diberlakukan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemkot Yogyakarta DIY 1992 – 2002) (2004) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan) Dibiaya LP3 UMY Rp. 2.500.000,- dan Kopertis Rp. 1.000.000,-
9. Peranan Kabupaten Way Kanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto Propinsi Lampung Tahun 1999-2002. (2005) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan)
10. Analisis Permintaan & Penawaran Uang Penatan Persamaan Simultan (Studi Kasus Indonesia Tahun 2000.1 – 2004.4). (2005) didanai LP3 UMY Rp. 2.500.000,-
11. Analisis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Propinsi Maluku Tahun 2000-2004. (2006) (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan).
12. Evaluasi penanganan pasca gempa di Kabupaten Bantul 2008 (Jurnal Ekonomi Universitas Tri Sakti 2009)
13. Peranan Kabupaten OKI terhadap Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (Jurnal JESP 2010)

14. Peranan Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Perekonomian Papua Tahun 2005-2009 (Jurnal Unisia UII 2010)
15. Penilaian Ekonomi Dampak Polusi Udara Perkotaan di DIY Pendekatan Sistem Informasi Geografi (penelitian Hibah Bersaing Tahun 2011 dibiaya DIKTI Jakarta)
16. Penilaian Ekonomi Dampak Polusi Udara Perkotaan di DIY Pendekatan Hedonic Price (penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012 dibiaya DIKTI Jakarta)
17. Penyusunan Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (didanai LP3M UMY tahun 2012)
18. Hedonic Valuation of Marginal Willingness to pay for air quality improvement (Jurnal Economic Journal of Emerging Markets, 2012)
19. Penyusunan Indikator dan kantong kemiskinan di Kabupaten kulon Progo (penelitian Hibah Bersaing tahun pertama 2013 dibiaya DIKTI Jakarta)
20. Penyusunan Indikator dan kantong kemiskinan di Kabupaten kulon Progo (penelitian Hibah Bersaing Tahun kedua 2014 dibiaya DIKTI Jakarta)

3. Buku

1. Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, **Pengantar Teori Ekonomi**, Penerbit Mitra Pustaka Nurani (MATAN) Tahun 2014
2. Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, **Pengantar Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis**, Penerbit Danisa Media Tahun 2014
3. Agus Tri Basuki dan Imamudin Yuliadi, **Elektronik Data Prosesing**, Penerbit Danisa Media Tahun 2014
4. letje Nazaruddin dan Agus Tri Basuki, **Analisis Statistik dengan SPSS**, Penerbit Danisa Media Tahun 2015.
5. Agus Tri Basuki, **Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis**, Penerbit Danisa Media Tahun 2015.

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

Nama : ENDAH SAPTUTYNINGSIH,SE.,MSi.
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Nopember 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gg. Blimbing BB 11 Perum Gedong Kuning
Yogyakarta 55198
No.telp / Hp. : (0274) 516948 / 081227050995
e-mail : end_naufal@yahoo.com

PENDIDIKAN

1. Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lulus tahun 1998
2. Magister Sains Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Lulus tahun 2003

PENGALAMAN KERJA

1. Asisten dosen UGM di Program S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada mata kuliah Ekonometri I dan Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada mata kuliah Metode Kuantitatif Pengambilan Keputusan (MKPK) serta asisten dosen UGM di STIE Kerjasama Yogyakarta pada mata kuliah Metodologi Penelitian (1996-1997).
2. Grader dosen UGM di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta pada mata kuliah Statistika Deskriptif (1997).
3. Staf Pengajar Tidak Tetap Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (September 2009-sekarang)
4. Peneliti di Pusat Studi Lingkungan dan Bencana UMY (Februari 2009-sekarang)
5. Staf pengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, Matematika 1, Matematika 2, Metodologi Penelitian, Ekonomi Manajerial Metode Pengambilan Keputusan Ekonomi, Evaluasi Proyek, Ekonomi Sumberdaya alam dan lingkungan (1999-sekarang).

HASIL KARYA ILMIAH

1. PUBLIKASI

- *Strategi Pembiayaan Sarana dan Prasarana Perkotaan di Kotamadya Yogyakarta.* Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 1 Nomor 1, April 2000. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- *Analisis Manfaat-Biaya Instalasi Pengolahan Air Limbah PT Sari Husada Yogyakarta.* Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 3 Nomor 2, Oktober 2002. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- *Economic Valuation of the Impact of Vehicle Exhaust on the Society Health in Sleman Regency.* The Journal of Accounting, Management, and Economics Research Volume 6 Number 2 August 2006.

- *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Willingness To Pay untuk Perbaikan Kualitas Air Sungai Code di Kota Yogyakarta.* Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8 Nomor 2, Oktober 2007. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- *Global Warming: Mampukah Kita Menghadapinya?.* Media INOVASI No.1 Tahun XVII, 2008. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- *Pembalakan Liar di Indonesia: Penyebab dan Penanggulangannya.* Jurnal Media Ekonomi Volume 14 Nomor 3, Desember 2008. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta.

2. PENELITIAN

- *Pengaruh Investasi Pemerintah untuk Pembangunan Prasarana terhadap Perkembangan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Skripsi-2000, tidak dipublikasikan.
- *Valuasi Ekonomi Dampak Gas Buang Kendaraan Bermotor terhadap Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sleman* (Dibiayai LP3M UMY, tahun 2004)
- *Pengaruh Peran Anak dan Gender dalam Penilaian Program Perbaikan Kualitas Air Sungai Code di Kota Yogyakarta: Pendekatan Contingent Valuation Methods* (Dibiayai DIKTI, tahun 2007)
- *Valuasi Ekonomi dan Mitigasi Dampak Bencana Polusi udara di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : Pendekatan Sistem Informasi Geografi* (Dibiayai DIKTI, 2008)
- *Valuasi Ekonomi Dampak Gas Buang Kendaraan Bermotor terhadap Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantul* (Dibiayai Kopertis Wilayah V, 2009)
- *Pemetaan dan Valuasi Ekonomi Perbaikan Kualitas Air Sungai di Kawasan Industri Tahu Tempe di Kota Yogyakarta: Pendekatan Sistem Informasi Geografi dan Contingent Valuation Methods* (Dibiayai LP3M UMY, 2009)

3. BUKU

EDP (Electronic Data Processing), Penerbit UPFE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003.